



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :G/ 506 /B.07/HK/2020**

TENTANG

**PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu menetapkan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menetapkan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, menjadi pedoman untuk penataan dan penyempurnaan di bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/437/B.09/HK/2018, tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6-11-2020

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 56/B.07/HK/2020
 TANGGAL : 6-11-2020

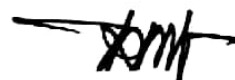
**REKAPITULASI ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	NILAI BEBAN KERJA/ EFEKTIVITAS JABATAN (EJ)	HASIL ABK	KELEBIHAN/ KURANGAN	PJ	Efektifitas Unit (EU)	PU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	1,383	1	0	A		
2	SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	1,264	1	0	A	1,827	A
3	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1	1,037	1	0	A		
4	Analisa Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	3	3,473	3	0	A		
5	Analisa Tata Usaha	3	3,473	3	0	A		
6	Sekretaris	0	1,031	1	1	A		
7	Pengelola Kepegawaian	0	1,117	1	1	A		
8	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	0	1,016	1	1	A		
9	Pengadministrasi Umum	1	1,975	2	1	A		
10	Pengemudi	1	2	2	1	A		
11	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	1	1,05	1	0	A		
12	Analisa Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	0	1,649	2	2	A		
13	Pengelola Data	0	2,276	2	2	A		
14	Analisa Keuangan	2	1,649	2	0	A		
15	Verifikator Data Laporan Keuangan	0	1,9	2	2	A		
16	Pengadministrasi Umum	3	3,27	3	0	A		
17	Bendahara	0	1,052	1	1	A		
18	KEPALA BIDANG FASILITASI PENDAFTARAN PENDUDUK	1	1,2	1	0	A	1,3773	A
19	KEPALA SEKSI FASILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDAFTARAN PENDUDUK	0	1,169	1	1	A		
20	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	1	1,549	2	1	A		
21	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	0	1,24	1	1	A		
22	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	0	1,18	1	1	A		
23	KEPALA SEKSI BINA APARATUR PENDAFTARAN PENDUDUK	1	1,122	1	0	A		
24	Analisa Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	2,148	2	0	A		
25	Pengolah Data	0	1,233	1	1	A		
26	Pengadministrasi Umum	0	1,34	1	1	A		

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	NILAI BEBAN KERJA/ EFEKTIVITAS JABATAN (EJ)	HASIL ABK	KELEBIHAN/ KEKURANGAN	PJ	Efektifitas Unit (EU)	PU
27	KEPALA SEKSI MONITORING, EVALUASI DAN DOKUMENTASI	1	1,122	1	0	A		
28	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1	1,765	2	1	A		
29	Pengelola Dokumentasi	0	1,387	1	1	A		
30	Pengadministrasian Umum	0	1,452	1	1	A		
31	KEPALA BIDANG FASILITASI PENCATATAN SIPIL	0	1,132	1	1	A	1,3488	A
32	KEPALA SEKSI FASILITASI SARANA DAN PRASARANA PENCATATAN SIPIL	0	1,089	1	1	A		
33	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	2	1,549	2	0	A		
34	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	0	1,316	1	1	A		
35	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	0	1,3	1	1	A		
36	KEPALA SEKSI BINA APARATUR PENCATATAN SIPIL	1	1,024	1	0	A		
37	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	2,148	2	1	A		
38	Pengolah Data	0	1,391	1	1	A		
39	Pengadministrasian Umum	1	1,34	1	0	A		
40	KEPALA SEKSI MONITORING DAN EVALUASI DAN DOKUMENTASI	0	1,028	1	1	A		
41	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	0	1,556	2	2	A		
42	Pengelola Dokumentasi	0	1,387	1	1	A		
43	Pengadministrasian Umum	1	1,276	1	0	A		
44	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA	1	1,282	1	0	A	1,3234	A
45	KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN	0	1,051	1	1	A		
46	Analisis Sistem Informasi	2	1,81	2	0	A		
47	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan	1	1,026	1	0	A		
48	Pengadministrasian Umum	1	1,34	1	0	A		
49	KEPALA SEKSI KERJASAMA DAN INOVASI PELAYANAN	1	1,053	1	0	A		
50	Analisis Kerjasama Lintas Sektor	1	1,994	2	1	A		
51	Pengolah Data	0	1,049	1	1	A		
52	Pengadministrasian Umum	1	1,34	1	0	A		
53	KEPALA SEKSI MONITORING DAN EVALUASI	0	1,1	1	0	A		
54	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1	1,556	2	1	A		

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	NILAI BEBAN KERJA/ EFEKTIVITAS JABATAN (EJ)	HASIL ADK	KELEBIHAN/ KURANGAN	PJ	Efektifitas Unit (EU)	PU
55	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	0	1,265	1	1	A		
56	Pengadministrasian Umum	1	1,34	1	0	A		
57	JF Administrator Database Kependudukan	0	0,983	1	1	B		
58	JF Administrator Database Kependudukan Muda	0	2,508	3	3	A		
59	JF Analis Kebijakan	0	1,391	1	1	A		
60	JF Analis Kebijakan	0	1,53	2	2	A		
61	JF Analis Kebijakan	0	1,257	1	1	A		
62	JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	0	1,437	1	1	A		
63	JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda	0	1,745	2	2	A		
64	JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Madya	0	1,025	1	1	A		
65	JF Arsiparis Pelaksana/Terampil	0	0,237	0	0	E		
66	JF Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir	0	1,296	1	1	A		
67	JF Arsiparis Penyelia	0	1,174	1	1	A		
68	JF Arsiparis Pertama	0	1,341	1	1	A		
69	JF Arsiparis Muda	0	1,551	2	2	A		
70	JF Arsiparis Madya	0	0,949	1	1	B		
71	JF Penata Laksana Barang Pelaksana/Terampil	0	0,949	1	1	B		
72	JF Penata Laksana Barang Pelaksana	0	1,004	1	1	A		
73	JF Penata Laksana Barang Penyelia	0	0,987	1	1	B		
74	JF Perencana Pertama	0	1,216	1	1	A		
75	JF Perencana Muda	0	2,666	3	3	A		
76	JF Perencana Madya	0	1,163	1	1	A		
77	JF Perencana Utama	0	1,324	1	1	A		
		40	110,997	104	63		1,44	A

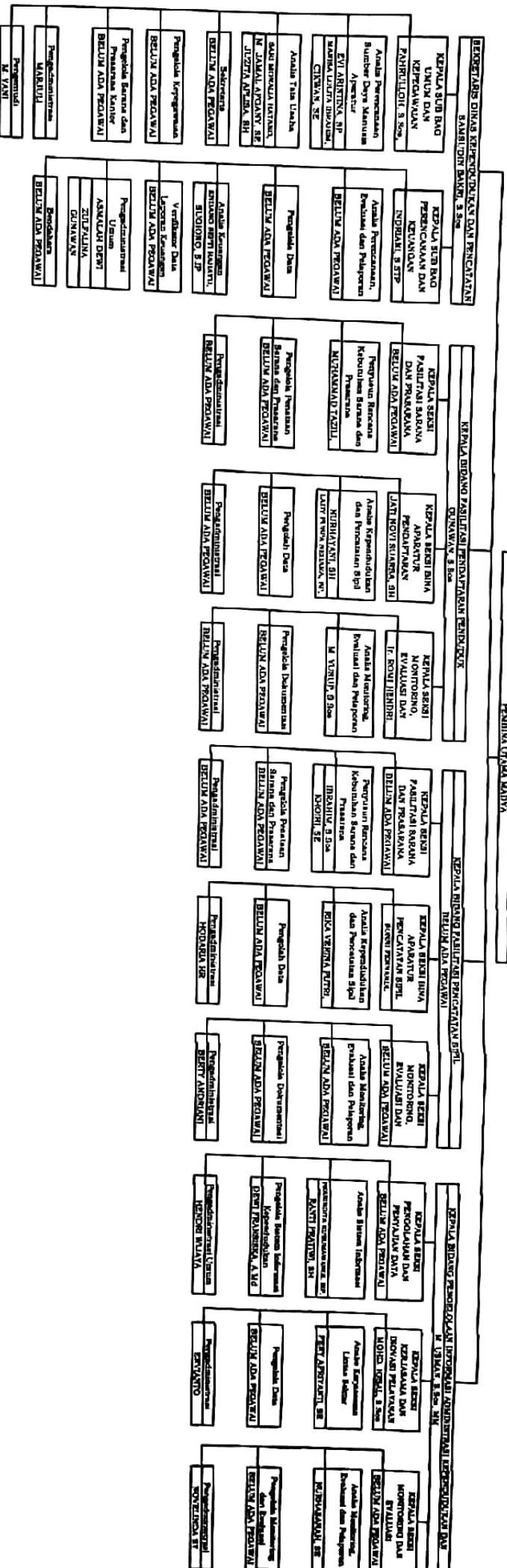
GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

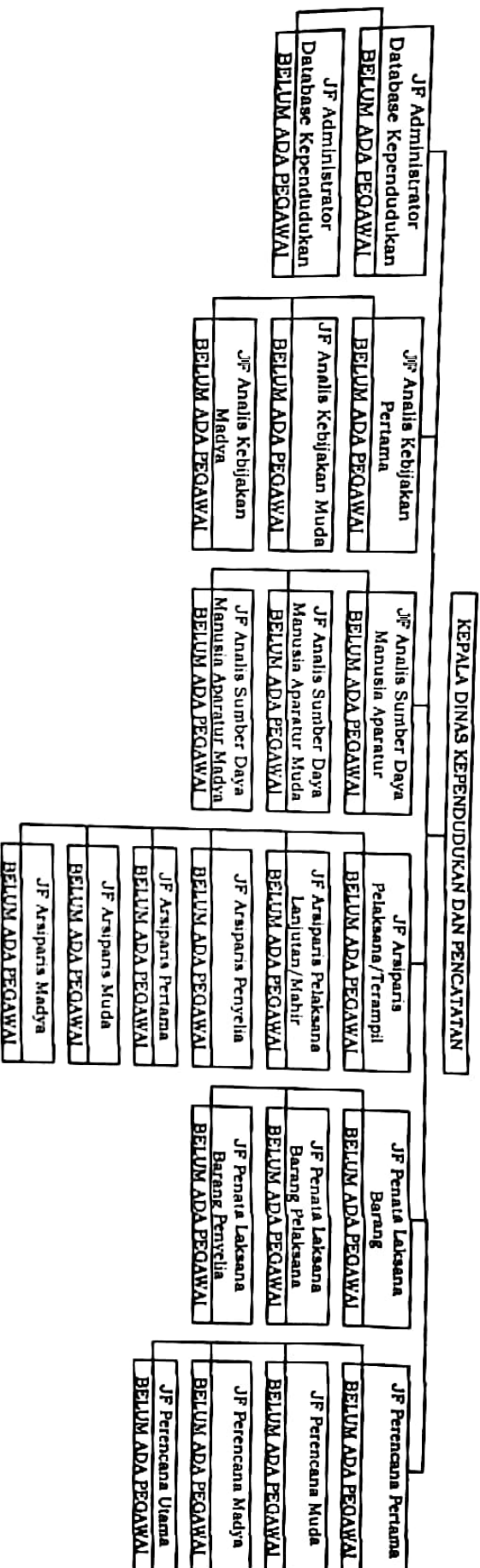


KEPADA YANG BERHENDAK DAN PENGANTARAN RPL
ALHABAD KAPITULON, BH
NIP 1969/209 201 501 1 001
RI DAN INURAN
PENJILAH URAHA MADYA



-7-

**PETA JABATAN FUNGSIONAL PELAKSANA HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI LAMPUNG**



GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

**PETA JABATAN STRUKTURAL DAN PELAKSANA HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI LAMPUNG**

JURUAN KEPUSTAKAAN PROWADI
40 Pegawai

B	K	KtA
1	1	15

B	K	KtA
1	1	9

B	K	KtA
1	1	9

B	K	KtA
1	1	1

BEBAN KERJA
Memuatkan rencana metode Diikuti
Memuatkan program dan kegiatan Diikuti
Memuatkan ROK Diikuti
Mengkoordinasikan, membina, dan memberi petunjuk pelaksanaan kerja

Jabatan	B	K	KtA
Analisa Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	3	3	7
Analisa Tata Usaha	3	3	7
Sekretaris	0	1	6
Pengelola Kepegawaian	0	1	6
Pengelola Sarana & Prasarana	0	1	6
Pengadministrasian Umum	1	2	5
Pengpantau	1	2	3

Jabatan	B	K	KtA
Analisa Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	0	2	7
Pengelola Data	0	2	6
Analisa Keuangan	2	2	7
Verifikasi Data Laporan	0	2	6
Pengadministrasian Umum	3	3	5
Bertanggung	0	1	7

B	K	KtA
1	1	11

B	K	KtA
0	1	9

B	K	KtA
0	1	11

B	K	KtA
0	1	9

B	K	KtA
1	1	11

B	K	KtA
0	1	9

Jabatan	B	K	KtA
Pengelola Perencanaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana	1	2	7
Pengelola Perencanaan Sarana dan Prasarana	0	1	6
Pengadministrasian Umum	0	1	5

Jabatan	B	K	KtA
Pengelola Perencanaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana	2	2	7
Pengelola Perencanaan Sarana dan Prasarana	0	1	6
Pengadministrasian Umum	0	1	5

Jabatan	B	K	KtA
Analisa Sistem Informasi	2	2	7
Pengelola Sistem Informasi	1	1	6
Pengadministrasian Umum	1	1	5

B	K	KtA
1	1	9

B	K	KtA
1	1	9

B	K	KtA
1	1	9

Jabatan	B	K	KtA
Analisa Keperluan dan Pencatatan Sipil	2	2	7
Pengelola Data	0	1	6
Pengadministrasian Umum	0	1	5

Jabatan	B	K	KtA
Analisa Keperluan dan Pencatatan Sipil	1	2	7
Pengelola Data	0	1	6
Pengadministrasian Umum	0	1	5

Jabatan	B	K	KtA
Analisa Keperluan Lintas Sektor	1	2	7
Pengelola Data	0	1	6
Pengadministrasian Umum	1	1	5

B	K	KtA
1	1	9

B	K	KtA
0	1	9

B	K	KtA
0	1	9

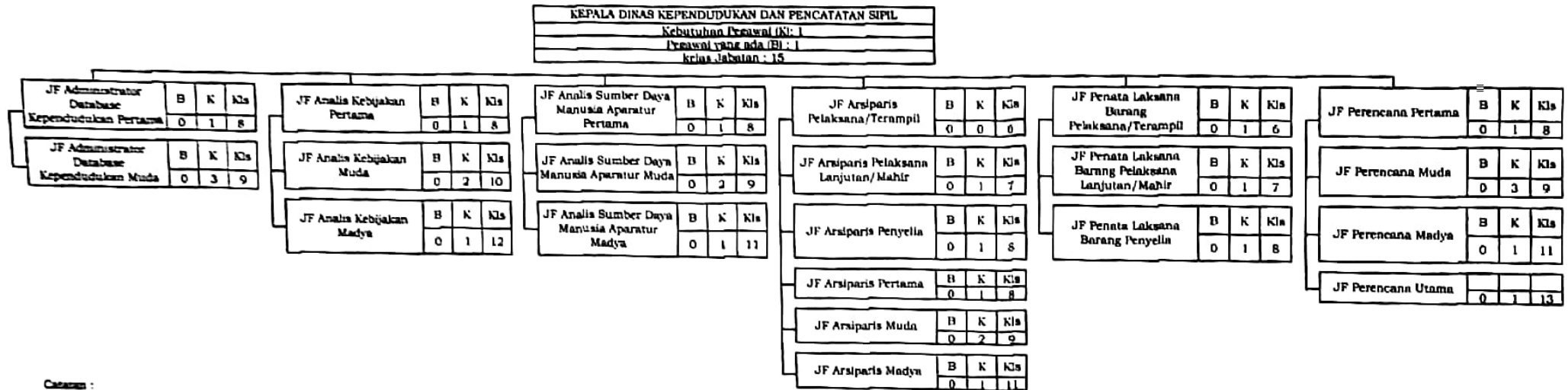
Jabatan	B	K	KtA
Analisa Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1	2	7
Pengelola Dokumentasi	0	1	6
Pengadministrasian Umum	0	1	5

Jabatan	B	K	KtA
Analisa Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	0	2	7
Pengelola Dokumentasi	0	1	6
Pengadministrasian Umum	1	1	5

Jabatan	B	K	KtA
Analisa Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1	2	7
Pengelola Monitoring dan Evaluasi	0	1	6
Pengadministrasian Umum	1	1	5

Catatan:
- jabatan = jabatan yang ada atau yang direncanakan
- B = Jabatan Kepala Regional Yang Ada
- K = Jabatan Kepala Regional Yang Didapat dari Analisa dan Beban Kerja
- KtA = Jabatan Kepala Regional Yang Didapat dari Analisa dan Beban Kerja

**PETA JABATAN FUNSIONAL HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI LAMPUNG**



Catatan :

B : Pegawai yang ada
K : Kebutuhan Pegawai
Kls : Kelas Jabatan

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI